

# PEMBARUAN TANI

MIMBAR KOMUNIKASI PETANI

## ***Petani korban kriminalisasi bebas setelah ditahan 5 bulan***

Setelah menjalani masa tahanan selama lima bulan sepuluh hari, tiga petani anggota DPB SPI Damak Maliho, korban kriminalisasi dibebaskan dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Deli Serdang, Jumat (24/4).

Para petani tersebut ditahan setelah melewati rangkaian teror dan penindasan yang berujung pada penangkapan pada tanggal 14 November 2008 lalu. Ketiga orang petani ini diantaranya Sumadi (57 tahun); Ngatimin alias Karcut (50 tahun); dan Jumadi alias Ribut (58 tahun) yang merupakan Ketua DPB SPI Damak Maliho. Mereka dikenakan pasal 47 UU No. 18 Tahun 2004 dengan tuntutan hukuman kurungan selama lima bulan sepuluh hari dan subsider satu bulan kurungan atau membayar denda sebesar satu juta rupiah.

Menurut keterangan warga Damak Maliho, kasus ini berawal dari konflik agraria atas lahan pertanian yang sekarang ini sedang dikuasi oleh PTPN IV Kebun Adolina. Padahal, masyarakat Damak Maliho mengaku sebagai pewaris sah dan pemilik lahan tersebut. Mereka membuka lahan sejak tahun 1960-an. Hingga pada tahun 1972, muncul perusahaan perkebunan P.T. Sari Tugas yang merampas dan mengambil alih secara paksa lahan milik warga dengan dukungan Kapten Kasmir Ali, penguasa Koramil Butepra pada waktu itu. Aparat koramil memaksa warga untuk meninggalkan lahan. Pada tahun 1974, P.T. Sari Tugas beralih nama menjadi PNP IV Pabatu, kemudian beralih lagi menjadi PNP VI Pabatu, dan hingga sekarang beralih nama menjadi PTPN IV Kebun Adolina Bah Jambi.

Pengacara PAHAM Sumatera Utara  
**Bersambung ke hal.2**



## **HARI PERJUANGAN PETANI**

### **Legislasikan perlindungan petani sebagai pengakuan dan pemenuhan hak asasi petani**

Masih banyak pelanggaran terhadap hak-hak petani yang dilakukan secara sengaja maupun sistemik baik oleh sistem pemerintahan maupun oleh institusi-institusi bisnis di Indonesia. Pelanggaran ini terus berjalan tanpa ada tanggung jawab (state responsibility) dari pemerintah selaku pemegang kewajiban (state obligation). Berbagai pelanggaran yang terjadi seringkali sangat spesifik terkait pertanian terutama mengenai penguasaan tanah dan teritori, benih dan pengetahuan tradisional, informasi dan teknologi

pertanian, keanekaragaman hayati, serta harga produk pertanian dan pasar.

Seperti kita ketahui bersama, lebih dari setengah rakyat Indonesia masih tergantung kepada sektor pertanian dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut data BPS, jumlah petani mencapai 44 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, atau sekitar 46,7 juta jiwa. Lebih dari separuhnya merupakan petani gurem dan buruh tani dengan kepemilikan lahan dibawah 0,5 hektar atau mencapai 38 juta keluarga tani.

Sepanjang tahun 2008

sendiri tercatat 63 kasus konflik agraria terjadi, bahkan sebagian besar merupakan kasus lama yang timbul kembali. Lebih dari 49.000 hektar lahan rakyat dirampas. Lebih dari 312 petani tercatat dikriminalisasi dengan ditangkap dan dijadikan tersangka, hampir semua petani yang ditangkap mengalami tindak kekerasan. Belum lagi lebih dari 31.267 KK petani yang tergusur dari tanahnya dan mengalami pelanggaran kesulitan hidup. Terdapat 7 orang meninggal. Data ini semua hanyalah data dari

**Bersambung ke hal.2**

**Sambungan dari hal.1** Legislasi perlindungan...

anggota SPI dan jaringan serta yang berhasil dikumpulkan, ada lebih banyak konflik dan korban yang masih tertutup informasinya dari publik.

SPI juga menyadari bahwa krisis pangan yang terjadi membebani rakyat miskin di Indonesia. Sebagian besar rakyat miskin di Indonesia adalah penduduk pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. Dan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang notabene masih merupakan negara agraris maka penegakan kedaulatan pangan dengan pengelolaan dan pembangunan sektor pertanian dan pangan yang dikelola negara bersama dengan masyarakat memiliki peranan yang lebih besar dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan dibandingkan sektor ekonomi

lainnya. Kedaulatan pangan akan tercapai apabila petani sebagai produsen utama pangan memiliki, menguasai dan mengontrol alat-alat produksi pangan seperti tanah, air, benih dan teknologi serta berbagai kebijakan yang mendukungnya dalam bingkai pelaksanaan pembaruan agraria. Untuk itulah juga dibutuhkan adanya perlindungan atas hak-hak petani dalam berproduksi, mendistribusikan hasil pertaniannya dan juga hak sebagai konsumen untuk dapat menikmati pangan yang cukup dan sehat.

Karena itulah dibutuhkan peraturan yang spesifik dan bersifat mengikat (legally binding) di berbagai level, mulai dari nasional hingga internasional. Di tingkat nasional petani tidak dianggap sebagai kelompok rentan dalam

UU HAM No. 39/1999, sementara secara nyata bisa kita lihat betapa banyaknya pelanggaran hak dan diskriminasi terhadap kelompok rentan ini.

Sementara di level internasional Instrumen PBB tidak dapat secara komplit menyeluruh atau bahkan mencegah pelanggaran hak asasi manusia terutama hak-hak dari petani. Kita dapat melihat keterbatasan kovenan/perjanjian ekonomi internasional, hak sosial budaya (ICESCR) sebagai instrumen untuk melindungi hak petani. Selain itu, Piagam Petani yang dibuat oleh FAO pada 1978 tidak dapat melindungi para petani dari kebijakan globalisasi neoliberal. Konvensi internasional yang lain yang berhubungan dengan hak-hak petani juga tidak dapat

diimplementasikan dengan baik.

Berkenaan dengan persoalan di atas dan mengambil momentum hari perjuangan petani internasional yang jatuh pada tanggal 17 April dan hari hak asasi petani nasional yang jatuh pada tanggal 20 April, maka SPI mendesak semua pihak untuk mengimplementasikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Petani dalam kebijakan perundang-undangan nasional. Kemudian mengupayakan pemenuhan hak atas pangan sebagai respon jangka menengah dan panjang menghadapi krisis pangan global. Terakhir, melaksanakan pembaruan agraria sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Petani demi terwujudnya kedaulatan pangan. #

**Sambungan dari hal.1** Petani korban kriminalisasi...

yang selama ini mendampingi ketiga orang petani anggota ini mengatakan bahwa tuntutan yang dituduhkan oleh pihak perusahaan PTPN IV Kebun Adolina terhadap ketiga orang petani ini sebenarnya tidak terbukti. "Ini dapat dilihat dari sidang-sidang yang telah digelar selama ini, pihak perusahaan tidak mampu membuktikan terjadinya perusakan lahan perkebunan yang dilakukan oleh petani. Bahkan saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak PTPN IV Kebun Adolina hanya bisa berasumsi, tanpa bisa membuktikan kebenaran pengrusakan lahan secara ilmiah" tutur Dodi salah satu Tim Pengacara Pembela Petani ketika menjemput para petani bersama dengan pengurus BPW SPI Sumut dari tahanan Polres Deli Serdang .

Kepulangan ketiga orang petani anggota DPB SPI

Damak Maliho disambut dengan suasana haru di posko perjuangan Basis Damak Maliho. Para anggota membuat acara penyambutan dengan 'upah-upah' (upacara adat masyarakat batak untuk mendoakan keselamatan) sebagai upaya untuk mengembalikan semangat dari ketiga pejuang HAP ini agar terus bersama melakukan perjuangan untuk merebut kembali lahan mereka yang dikuasai oleh PTPN IV Kebun Adolina.

"Ini merupakan bagian dari perjuangan untuk merebut kembali lahan ini. Selama dalam tahanan, saya bertemu dengan berbagai petani di Deli Serdang yang juga mengalami nasib yang sama dengan kami. Mendekam di tahanan karena memperjuangkan hak-hak mereka yang dirampas. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak petani yang



memperjuangkan tanahnya untuk dikembalikan, yang menjadi korban dipenjara akibat adanya undang-undang perkebunan. Semoga hambatan yang akan kita hadapi di depan tidak akan menyusutkan langkah perjuangan kita untuk

merebut lahan ini" kata Jumadi alias Ribut saat diminta oleh anggota basis untuk menceritakan pengalaman yang dialami semasa menjalani masa tahanan.#



**Penanggung Jawab:** Henry Saragih **Pemimpin Umum:** Zaenal Arifin Fuad **Pemimpin Redaksi:** Cecep Risnandar; **Redaksi:** Achmad Ya'kub, Ali Fahmi, Agus Rully, Tejo Pramono, Muhammad Ikhwan, Wilda Tarigan, Syahrani; **Reporter:** Elisha Kartini Samon, Susan Lusiana (Jakarta), Andriana (Medan) **Sekretaris Redaksi:** Tita Riana Zen **Kuangan:** Sriwahyuni **Sirkulasi:** Supriyanto, Gunawan;

**Penerbit:** Serikat Petani Indonesia (SPI)

**Alamat Redaksi:** Jl. Mampang Prapatan XIV No.5 Jakarta Selatan 12790. **Telp:** +62 21 7991890 **Fax:** +62 21 7993426 **Email:** pembedarantani@spi.or.id **website:** www.spi.or.id

## WILAYAH

# Membangun kesadaran kritis anggota

Pendidikan kader dasar harus diarahkan untuk membangun kesadaran kritis anggota. Hal tersebut tercetus pada pendidikan kader E yang dilaksanakan SPI Basis Mekar Jaya di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara tanggal 17-18 Maret 2009. Pendidikan kader tersebut diikuti oleh tigapuluh tujuh orang anggota SPI Basis Mekar Jaya. Sebelumnya DPW SPI Sumatera Utara telah menyelenggarakan pendidikan kader E di sejumlah basis antara lain di Kecamatan Bandar Pulau dan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan serta di Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Latihan kader tersebut ditujukan kepada anggota SPI telah menjalankan tugas-tugas keorganisasian dan merupakan ujung tombak bagi SPI sebagai sebuah organisasi gerakan massa. "SPI harus mampu

melahirkan kader-kader petani melalui berbagai proses pendidikan. Pendidikan yang diberikan tidak terbatas pada hal-hal yang teknis, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana akhirnya peserta didik mampu berfikir kritis dalam memahami realita yang ada, sehingga mengembalikan fitrahnya sebagai manusia merdeka," demikian Henri Chandra Hasibuan, Ketua Biro Pendidikan DPW SPI Sumatera Utara.

Selanjutnya Henri mengatakan bahwa tujuan utama dari Pendidikan Kader E, selain menciptakan kader-kader terdidik juga untuk melahirkan guru-guru kader di setiap tingkatan cabang Serikat Petani Indonesia (SPI). "Pergantian bentuk organisasi dari federatif ke unitaris menuntut suatu proses pendidikan yang berjenjang sehingga membutuhkan



lahirnya guru-guru kader untuk membangun pondasi pendidikan organisasi ke depannya" paparan Henri Chandra.

Ke depannya Henri Chandra menargetkan akan melakukan pendidikan kader berjenjang

sehingga akan melahirkan kader-kader yang dapat memikul tugas-tugas organisasi dari tingkat wilayah, cabang, ranting hingga basis yang ada di Sumatera Utara.#

## HAK ASASI PETANI

## 3 petani Ujung Kulon kembali dikriminalisasikan

Sangat ironi, bertepatan dengan hari Perjuangan Petani Internasional yang jatuh setiap tanggal 17 April, 3 petani Ujung Kulon ditangkap aparat Kepolisian Sektor Sumur, Pandeglang, tepatnya pukul 03.00 WIB tiga. Penangkapan dilakukan atas tuduhan warga menebang kayu di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), padahal menurut warga, kayu yang ditebang berasal dari lahan garapan milik warga yang telah dikelolanya secara turun-temurun. Ketiga petani tersebut adalah Salta (22), Endang (25) dan Rusmain (29), mereka adalah anggota Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) berasal dari Kampung Cikawung Girang, Desa Ujung Jaya, Sumur-Pandeglang.

Sebelumnya, pada tahun 2006

telah terjadi penembakan oleh petugas Balai-TNUK yang menyebabkan 1 orang petani tewas ditembus peluru aparat diatas tanahnya sendiri. Peristiwa ini lalu memicu protes besar dan rakyat membakar pos-pos jaga milik B-TNUK. Sejak peristiwa itu, aparat terus melakukan serentetan penangkapan terhadap petani Ujung Kulon.

Konflik agraria yang terjadi di Ujung Kulon dimulai ketika pada tahun 1984 dilakukan perluasan wilayah kawasan hutan yang bersamaan dengan dirubahnya status dari Cagar Alam Ujung Kulon menjadi Taman Nasional Ujung Kulon. Perubahan status yang diikuti dengan perluasan wilayah kawasan hutan TNUK tersebut, menyebabkan beberapa kampung di beberapa desa

sekitar kawasan hutan TNUK berubah status menjadi wilayah kawasan TNUK. Hunian dan lahan garapan warga seperti sawah dan kebun menjadi bagian dari kawasan hutan TNUK.

Dari peristiwa-peristiwa tersebut, sebenarnya sudah dilakukan upaya mediasi konflik oleh Komnas HAM, yang diikuti Pemerintah Kabupaten, Balai-TNUK, Pemerintah Desa, Masyarakat Ujung Kulon, Polres dan BPN Pandeglang. Mediasi tersebut merekomendasikan dibentuknya Tim bersama untuk melakukan upaya penyelesaian konflik, yang salah satunya dengan akan dilakukannya pengukuran ulang tapal batas antara kawasan hutan TNUK dengan perkampungan dan lahan

garapan warga. Sampai sekarang rekomendasi tersebut belum dijalankan, karena masih menunggu dikeluarkannya SK Bupati Pandeglang perihan Tim Penyelesaian konflik tersebut.

Abah Suhaya, ketua Serikat Tani Ujung Kulon (STUK) menyatakan bahwa, masyarakat ujung kulon yang tergabung dalam STUK akan membela anggotanya yang tidak bersalah tersebut, dan kepada Pemerintah Kabupaten, Balai-TNUK serta Aparat Kepolisian Pandeglang untuk segera membebaskan ketiga warga yang ditangkap. "Masyarakat sudah capek dengan konflik ini, jika tidak juga diselesaikan dan penangkapan-penangkapan warga masih dilakukan, maka ketegangan di Ujung Kulon mungkin saja akan terulang, ujanya.#

## WILAYAH

# SPI cabang Asahan menuntut penyelesaian konflik agraria

Ratusan massa yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Asahan mendatangi Kantor Bupati Asahan (5/3) menuntut penyelesaian sengketa tanah yang dialami oleh anggota SPI Basis Simpang Kopas dan SPI Basis Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dalam usaha merebut kembali lahan pertanian milik mereka yang dikuasai oleh PT Jaya Baru Pratama dan PT Bakrie Sumatera Plantation.

Pada tahun 1949 masyarakat yang berasal dari Tomuan Holbung dan Desa Huta Padang membuka lahan pertanian dan sekaligus membuka perkampungan. Perkampungan yang mereka diami diberi nama Sordang Tonga-tonga (Desa Simpang Kopas – sekarang). Pada saat itu pemerintahan masih bersistem kewedanaan (setingkat desa) dan Desa Huta Padang masih dipimpin oleh kepala kampung M. Bosir Sinurat. Tahun 1984, diadakan pencekingan atas areal masyarakat oleh oknum penguasa desa dengan alasan akan digantirugikan dengan pihak perusahaan, tanpa ada musyawarah tentang harga atas areal/tanah yang dikelola oleh masyarakat. Kemudian memanggil pemilik tanah untuk menerima ganti rugi atau lap keringat tanpa diketahui harga dan luas areal masing-masing penduduk yang diambil yang diambil tanahnya dan disuruh menandatangani tanda terima uang. Ternyata uang lap keringat hanya Rp 25.000/Ha dibagikan per orang tanpa melihat luas lahan yang dikelola masyarakat. Jika masyarakat menolak dan tidak bersedia menerima ganti rugi tersebut diintimidasi dan dituduh sebagai PKI atau penghalang pembangunan, sehingga intimidasi dan penindasan oleh oknum petugas pengawas pihak perusahaan untuk mengerjakan lahan

tersebut. Lahan seluas 600 Ha saat ini dikuasai oleh PT Jaya Baru Pratama yang jelas-jelas tidak memiliki HGU.

Sementara itu, pada tahun 1953 masyarakat Sei Kopas membuka lahan di Desa Silau Jawa (Desa Sei Kopas – sekarang). Tahun 1983, Bupati Asahan pada waktu itu (Bahmit Muhammad - red) melalui Kepala Desa Silau Jawa dan Huta Padang menghimbau agar masyarakatnya menginventarisasi tanah tersebut kepada pemerintah setempat dengan maksud agar dijadikan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat – red) dan menunjuk PT USP (Usaha Swadaya Pradana – red)

*Tahun 1984, diadakan pencekingan atas areal masyarakat oleh oknum penguasa desa dengan alasan akan digantirugikan dengan pihak perusahaan, tanpa ada musyawarah tentang harga atas areal/tanah yang dikelola oleh masyarakat.*

sebagai bapak angkat dari program PIR. Tahun 1989, Bupati (Bahmit Muhammad) mengalihkan lahan kepada pihak-pihak pribadi staff PT Usaha Swadaya Pradana.

Selanjutnya PT Usaha Swadaya Pradana, yang ditunjuk sebagai bapak angkat pola PIR, merubah nama perusahaannya menjadi PT United Sumatera Plantation. PT United Sumatera Plantation menggunakan kesempatan untuk memperluas arealnya dengan menanami pohon karet ke daerah perladangan Sionggang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge seluas kurang lebih 1.442 Ha, tanpa ada izin surat-surat penggarapan. Dari lahan yang digarap PT USP, seluas 674 Ha di dalamnya adalah lahan milik masyarakat Silau Jawa (sekarang Sei Kopas) dan Huta Padang. Tahun 1998, bapak angkat pola PIR mengusulkan izin HGU kepada Gubernur Sumatera

Utara, namun ditolak dan ditanggihkan karena masih tergolong dalam lahan sengketa, dengan dikeluarkannya SK Gubernur Sumatera Utara Nomor: 593.05/1392/K tahun 1998. Melalui SK tersebut telah dibentuk tim penertiban Permasalahan Garapan Penduduk di Areal PTPN II dan lainnya di Propinsi Sumatera Utara. Besar kemungkinan dikarenakan ketidakmampuan dalam pengelolaan maupun dalam pengurusan HGU. PT USP mengalihkan lahan sengketa kepada PT Bakrie Sumatera Plantation. Sampai saat ini lahan seluas 220 Ha tersebut masih dikuasai oleh PT

Bakrie Sumatera Plantation.

Sejak bergulirnya masa reformasi masyarakat menghimpun kekuatan untuk merebut kembali lahan mereka, masyarakat yang tinggal di Desa Simpang Kopas bergabung menjadi anggota SPI Basis Simpang Kopas berjuang merebut kembali lahan mereka seluas 600 Ha yang dikuasai oleh PT Jaya Baru Pratama. Sementara itu masyarakat yang bermukim di Desa Sei Kopas menggabungkan diri menjadi anggota SPI Basis Sei Kopas berjuang merebut kembali lahan mereka seluas 220 Ha yang dikuasai oleh PT Bakrie Sumatera Plantation.

Dalam perjalanan memperjuangkan lahan ini, berbagai tindakan intimidasi dan kekerasan kerap terjadi. Walau demikian berbagai usaha juga ditempuh untuk merebut kembali lahan tersebut, mulai dari membuat pengaduan ke pihak Legislatif, Eksekutif, dan

BPN, dari tingkat Kabupaten hingga Propinsi yang masih dalam proses penyelesaian, bahkan petani anggota SPI Basis Sei Kopas juga melakukan pendudukan terhadap lahan dengan membangun gubuk-gubuk di lahan serta menanami lahan dengan tanaman pangan seperti ayur. Hal ini dilakukan selain untuk mempertahankan lahan milik mereka juga sebagai upaya meningkatkan taraf ekonomi.

Kali ini kembali petani anggota SPI Basis Simpang Kopas dan SPI Basis Sei Kopas membuat pengaduan dengan melakukan aksi bersama dengan anggota SPI Kabupaten Asahan di Kantor Bupati Asahan, menuntut agar pihak Pemkab Asahan segera menyelesaikan sengketa lahan yang dihadapi ini. Massa diterima oleh Asisten I Pemkab Asahan Zulkarnaen yang berjanji dalam dua minggu ini akan mengundang kedua perusahaan (PT Jaya Baru Pratama dan PT Bakrie Sumatera Plantation – red) untuk berdialog mengenai lahan yang dalam sengketa. "Untuk selanjutnya kami juga akan mengundang anggota SPI Kabupaten Asahan setelah pertemuan tersebut" lanjut Zulkarnaen.

Pihak BPN Kabupaten Asahan juga hadir dalam kesempatan ini, dan mereka membenarkan bahwa PT Jaya Baru Pratama tidak memiliki HGU. Namun, ketika massa meminta surat keterangan tidak memiliki HGU pihak BPN Kabupaten Asahan tidak mau memberikannya. "BPN Asahan mengarahkan agar kami meminta langsung ke Kanwil BPN Sumut. Kami dijadikan seperti bola, karena jika kami meminta ke Kanwil BPN Sumut maka akan dianjurkan ke BPN Kabupaten" kata Zubaidah Ketua SPI DPC Asahan.#

## HAK ATAS PANGAN

# Kedaulatan pangan adalah konsep dan praktek alternatif pembangunan pertanian

“Kami mempromosikan kedaulatan pangan sebagai praktek dan konsep alternatif dalam pembangunan pertanian yang memenuhi pendekatan hak asasi manusia dan hak atas pangan,” demikian pernyataan ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, dihadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York 6 April kemarin.

Dialog yang bertema “Krisis Pangan Global dan Hak Atas Pangan” yang diadakan Majelis Umum PBB ini membahas permasalahan krisis pangan dan pemenuhan hak atas pangan menghadapi krisis global yang melanda dunia internasional saat ini. Henry diundang sebagai salah satu pembicara mewakili organisasi buruh tani dan petani kecil yang tergabung dalam La Via Campesina.

Lebih jauh Henry mengemukakan, bahwa strategi yang dibangun organisasi pangan dunia (FAO) dalam KTT pangan yang diadakan di Roma pada tahun 1996 telah gagal mencapai target. Dimana pada saat itu, FAO bersama dengan pimpinan negara-negara menargetkan akan mengurangi jumlah orang kelaparan hingga setengahnya pada tahun 2015. Namun pada kenyataannya, saat itu (tahun 1996) terdapat 850 juta orang di dunia yang hidup dalam situasi kelaparan dan setelah 13 tahun berlalu masih saja tidak ada kemajuan. Bahkan angka kelaparan ada kecenderungan bertambah, menurut data FAO sendiri pada tahun 2008 jumlah angka kelaparan di dunia menjadi 925 juta jiwa.

Kegagalan ini disebabkan kebijakan yang salah, dimana konsep ketahanan pangan yang dibuat FAO terlalu menekankan kepada kecukupan pangan tanpa memperhatikan dari mana pangan itu didapatkan dan bagaimana cara



produksi. Pasokan pangan mengandalkan mekanisme perdagangan global sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Padahal kita tahu, pasar global hanya dikuasai segelintir perusahaan transnasional dan perusahaan-perusahaan agribisnis besar, lahan-lahan pertanian dikuasai untuk ditanami komoditi pangan dan perkebunan yang bernilai ekspor tinggi. Sementara itu, pertanian keluarga yang dikelola oleh petani semakin tersisih dan tersingkir. Banyak petani di negeri dunia ketiga yang kehilangan penghidupan dan tanahnya akibat ekspansi perusahaan-perusahaan agribisnis besar. Para petani tersebut terjerembab kedalam kemiskinan yang berkelanjutan. Hingga wajar saja apabila sebagian besar kelaparan terjadi di desa-desa yang nota bene hidup dari pertanian.

Atas dasar itu, La Via

Campesina bersama dengan ratusan organisasi tani anggotanya yang terdapat di berbagai belahan bumi mulai mengerjakan sebuah praktek pertanian yang lebih adil, baik itu untuk konsumen maupun untuk petani sebagai produsen pangan. Kami menamai konsep alternatif ini kedaulatan pangan.

Pada hakikatnya, kedaulatan pangan itu sendiri adalah hak rakyat untuk mendapatkan pangan yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas yang diproduksi oleh sebuah sistem pertanian berkelanjutan dimana petani sebagai produsennya bebas menentukan sendiri apa yang hendak ditanamnya dan sistem apa yang akan dipakainya. Kedaulatan pangan menempatkan keluarga petani sebagai subjek utama produsen pertanian dan bukannya perusahaan-perusahaan agribisnis besar. Selain itu, dalam kedaulatan pangan memprioritaskan kepentingan ekonomi dan pasar lokal dan nasional dibanding kepentingan

pasar global.

Menurut Henry, ada beberapa pilar yang harus ditegakkan untuk melaksanakan kedaulatan pangan diantaranya; pertama, melaksanakan pembaruan agraria dengan konsep utama tanah untuk penggarap yang bekerja di atasnya. Karena tanpa adanya kedaulatan petani atas tanah tidak mungkin tercipta sistem pertanian yang berkeadilan, tanpa tanah petani akan selalu menjadi objek eksploitasi dari pihak-pihak yang berkuasa atas tanah. Kedua, pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi besar dan pasar global. Pemerintah di setiap negara harus memproteksi kepentingan lokal dan nasionalnya terlebih dahulu. Ketiga, petani harus diberikan akses untuk perumusan kebijakan pertanian. Karena selama ini petani kecil dan buruh tani tidak dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan pertanian.#

# Pertemuan kader pertanian berkelanjutan

MEDAN. Pertanian berkelanjutan atau lebih populer dengan nama pertanian organik saat ini banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Karena sesungguhnya sistem pertanian ini sudah menjadi bagian dari kebudayaan nenek moyang kita, namun sejak muncul program revolusi hijau sistem pertanian seperti ini mulai ditinggalkan. Padahal keharmonisan hubungan antara alam dengan manusia sudah menjadi prasyarat mutlak untuk keberlanjutan bumi dan kedamaian umat manusia.

Namun kondisi Petani saat ini sungguh memprihatinkan, tingginya biaya produksi seperti pupuk kimia, pestisida, bibit, herbisida, fungisida dan sebagainya ternyata tidak diikuti dengan hasil produksi yang diperoleh setelah panen. Mengingat hal ini diperlukan suatu langkah untuk bisa menerapkan sistem pertanian yang berbasis dengan alam.

Serikat Petani Indonesia (SPI) yang salah satu agenda perjuangan yang diusung adalah kedaulatan pangan melalui pertanian berkelanjutan. Mengingat pentingnya pertanian berkelanjutan ini, Badan



Pengurus Wilayah (BPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara mengadakan pertemuan dengan seluruh kader yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pertanian Organik (PO) selama dua hari yaitu tanggal 13-14 Maret di Sekretariat DPW SPI Sumatera Utara. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa kabupaten diantaranya Padang Lawas, Deli Serdang, Karo, Labuhan Batu, Langkat, Samosir, Simalungun, Asahan dan

perwakilan dari Kodya Medan.

Tujuan dari pertemuan ini selain sebagai sarana tukar pengalaman dan sharing informasi perkembangan pertanian organik antara sesama kader pertanian organik. "Selain itu pertemuan ini diharapkan dapat mengidentifikasi pengembangan praktik-praktik keberhasilan pertanian organik untuk kampanye gerakan tani" kata Kepala Biro Koperasi BPW SPI Sumut, Ramadhan Sakti Siregar disela-sela

pertemuan ini.

Dari pertemuan selama dua hari ini disepakati bahwa pertemuan seperti ini akan terus dilaksanakan secara berkala setiap tiga bulan sekali dan peserta menyepakati bahwa kumpulan kader ini diberi nama "Forum Komunikasi dan Pendidikan Pertanian Berkelanjutan". Pada tiga bulan ke depan pertemuan ini akan dilakukan di Desa Doulu Kabupaten Karo.#

## Restorasi kebijakan pertanian!

Harus ada upaya kongkrit untuk merestorasi total kebijakan pertanian demi kepentingan nasional. Hal tersebut dikemukakan Ketua Departemen Kajian Strategis Serikat Petani Indonesia (SPI) dalam seminar nasional "Pertanian Jaya Indonesia Sejahtera" yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (16/3). Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Musyawarah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia, yang berlangsung dari tanggal 16-19 Maret 2009.

Sementara itu, Iskandar Andi Nuhung mewakili Menteri Pertanian Republik Indonesia, menyampaikan bahwa

Indonesia hanya memiliki lahan seluas 20-30 juta hektar karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Salah satu kemunduran sektor pertanian Indonesia juga karena sumber daya alam yang ada belum dikelola secara optimal. Modal dasar untuk membangun pertanian yang jaya salah satunya melalui political will untuk merevitalisasi pertanian, mengembangkan potensi SDA, iklim tropis, budaya agraris, pasar domestik dan internasional. Pemerintah juga telah meluncurkan berbagai program untuk mensejahterakan petani.

Achmadi Partowijoto, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia dalam paparannya beliau menyampaikan tentang potensi

lahan dan air dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pembicara kedua lebih banyak menyajikan data-data teknis tentang pertanian di Indonesia, diantaranya data-data tentang luas lahan pertanian di Indonesia, lahan irigasi, pola curah hujan, volume air sungai dan danau, waduk dan air tanah, serta data tentang produksi tanaman pangan.

Sedangkan, Prof. Widji Widodo, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mendorong mahasiswa pertanian di seluruh Indonesia agar bisa membangun pertanian jaya, untuk mencegah ditinggalkannya lahan-lahan pertanian oleh penduduk desa

karena urbanisasi. Mahasiswa pertanian juga didorong agar lebih berani melakukan perubahan untuk mencapai pertanian jaya, dengan menggunakan pendekatan "opportunity cost" yaitu menghitung semua biaya .

Servas Pandur dari Badan Biro Intelejen, mengatakan bahwa di masa yang akan datang, yang akan memimpin adalah sektor pertanian. Karena itu harus dimulai pertanian yang menghormati ekosistem, serta diperlukan juga usaha-usaha mitigasi perubahan iklim. Servas Pandur menegaskan bahwa pertanian tidak hanya untuk petani dan masyarakat, tapi terutama untuk security system.#



LEMBARAN KHUSUS

# campesinos

KABAR INTERNASIONAL

## ORGANISASI

# Pertemuan pemuda La Via Campesina region Asia Timur-Asia Tenggara II

Pertemuan Pemuda Via Campesina Asia-Timur-Asia Tenggara II kali ini diselenggarakan di Dili, Timor Leste sejak tanggal 25-30 Maret 2009. Pertemuan Pemuda I region ini diselenggarakan pada bulan Oktober 2007 lalu di Chiang Mai, Thailand. Dalam pertemuan ini HASATIL sebagai anggota Via Campesina di Timor Leste berlaku sebagai tuan rumah penyelenggara. Dalam Pertemuan Pemuda II kali ini diikuti oleh 9 organisasi dari 6 negara yaitu Indonesia, Timor Leste, Jepang, Korea Selatan, Filipina, dan Thailand serta 1 negara sebagai pengamat yaitu Australia.

Agenda utama dalam pertemuan pemuda yang direncanakan untuk diselenggarakan dilakukan setahun sekali ini ialah untuk memilih 1 laki-laki dan 1 perempuan sebagai perwakilan pemuda region Asia Timur-Asia Tenggara dan menetapkan rencana kerja untuk 1 tahun ke depan. Pentingnya keterlibatan pemuda dalam organisasi tani karena pemuda merupakan tulang punggung pertanian di negara masing-masing serta juga merupakan kader-kader pemimpin organisasi di masa yang akan datang. Dari pertemuan pemuda ini terpilih lah Ayumi Kinezuka dari Nouminren Jepang dan Arsenio Pereira da Silva dari HASATIL Timor Leste sebagai perwakilan pemuda region Asia Timur-Asia Tenggara.

Salah satu rangkaian kegiatan dalam pertemuan pemuda ini dilaksanakanlah Seminar Internasional mengenai Peran Pemuda dalam Pertanian. Menariknya seminar internasional ini dilaksanakan di sebuah desa kecil bernama Desa Uma Kaduak, District Manatutu berjarak sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Dili, di tengah perkemahan pramuka pemuda tani. Seminar ini dihadiri pula oleh 4 orang menteri yaitu menteri pertanian, perikanan, lingkungan hidup serta menteri pemuda dan olahraga. Dalam seminar internasional ini para pembicara



dari delegasi pemuda Via Campesina menyampaikan kondisi pertanian di negaranya serta masalah yang dihadapi para pemuda khususnya di pertanian.

Dari Indonesia, Marda Ellius anggota MNP yang menjadi salah satu perwakilan SPI dalam pertemuan ini menyampaikan keterlibatan pemuda dalam menegakkan hak asasi petani dan mewujudkan pembaruan agraria. Marda menyampaikan bahwa pemuda lah yang hampir selalu berada di barisan terdepan perjuangan ini, pemuda memiliki peranan penting sehingga suara mereka perlu untuk didengar. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam organisasi tentu tidak terlepas dari peran pendidikan. Marda menyampaikan bahwa salah satu langkah yang telah dilakukan SPI di Sumatra Selatan ialah melalui Sekolah Ibnu Falah untuk menampung anak-anak petani dimana selain mendapatkan kurikulum seperti di sekolah umum anak-anak petani ini juga mendapatkan pendidikan mengenai pertanian. Sementara ditingkat nasional telah dilakukan pendidikan pertanian organik selama 2 bulan yang diberikan

kepada pemuda dari beberapa wilayah di Pusdiklat Pertanian Organik SPI di Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu delegasi pemuda dari negara lain seperti Jepang dan Korea menyampaikan bahwa walaupun negara mereka dianggap sebagai negara maju tetapi tetap sulit bagi petani terutama untuk bertahan hidup di pedesaan. Perjanjian pasar bebas telah menghancurkan pertanian di negara ini sehingga bagi pemuda sangat sulit untuk terlibat dalam sektor pertanian.

Di Thailand dan Filipina kondisi yang hampir serupa dengan Indonesia juga terjadi, masalah tanah masih menjadi isu utama perjuangan. Kepemilikan tanah dan sumber agraria yang timpang menyebabkan pemuda tani harus mencari pekerjaan ke kota atau menjadi buruh migran di negara-negara lain. Sementara di Australia sendiri minat pemuda pada pertanian sangat kecil sedangkan di sisi lain ketergantungan pada makanan cepat saji (fast food) sudah berada di ambang yang sangat berbahaya bagi kesehatan dimana sekitar 1,5 juta penduduk Australia

*Bersambung ke hal.10*



## HARI PERJUANGAN PETANI

# Aksi MST untuk pembaruan agraria

Dalam beberapa minggu ke depan direncanakan akan dilakukan mobilisasi di seluruh Brazil sebagai peringatan atas terbunuhnya 19 orang buruh tak bertanah 13 tahun yang lalu dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pembantaian Eldorado de Carajás.

Hari Perjuangan Nasional yang diadakan sebagai peringatan terhadap tewasnya 19 orang buruh tak bertanah 13 tahun yang lalu dalam pembantaian Eldorado de Carajás (PA) telah menggerakkan petani-petani dari 8 negara bagian dan District Federal sejak awal bulan. Mobilisasi ini untuk mendesak pelaksanaan pembaruan agrarian dan melawan agribisnis. Hari Rabu ini (10/4) dilaksanakanlah sejumlah okupasi lahan, dan aksi di Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Pará, Bahia dan Distrik Federal. Sejak minggu lalu telah ada pula sejumlah aksi di São Paulo, Minas Gerais dan Roraima.

“Krisis ekonomi telah menunjukkan bahwa agribisnis tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para buruh di pedesaan. Kami mendukung pelaksanaan pembaruan agraria dan program agro-industri di pemukiman-pemukiman untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pembangunan di pedesaan,” kata salah seorang anggota koordinasi MST Marina dos Santos.

Sejak November 2008 hingga Februari 2009 terdapat sekitar 747,515 orang kehilangan pekerjaan di negeri ini.

Seluruh sector agribisnis kehilangan 268,888 pekerjaan (di sector pertanian terdapat sekitar 145,631 kehilangan lapangan kerja, di sector pengolahan makanan dan minuman terdapat 123,257 kehilangan pekerjaan), yaitu 35% dari total pekerjaan di pertanian (data dari Dieese). Data ini menunjukkan bahwa banyak dari pekerjaan-pekerjaan agribisnis dihapuskan, walaupun terdapat kebijakan kredit pedesaan dari pemerintah federal.

Tahun lalu, BNDES (Brazilian Development Bank) telah memberikan pinjaman lebih dari 17,2 miliar reais kepada perusahaan-perusahaan agribisnis. Bank Brazil telah menginvestasikan lebih dari 10 miliar \$R hanya untuk 20 perusahaan agribisnis. Sementara itu PRONAF (Program Nasional Keluarga Petani) diramalkan hanya mengeluarkan 7,2 miliar \$R untuk tahun 2008/2009, bagi 1,2 juta keluarga petani kecil.

“Pemerintah federal membiaya pinjamannya melalui pengangguran di agribisnis. Kami membutuhkan kebijakan kredit pedesaan baru, dengan penciptaan batasan khusus untuk para pemukim (settlers) dan pengurangan kerumitan birokrasi kredit bagi petani kecil. Kami percaya bahwa semua perusahaan agribisnis yang mengambil sumber daya publik dan telah memecat karyawannya seharusnya diusir keluar dari areal mereka dan bahwa semua keluarga buruh-buruh perkebunan yang kehilangan pekerjaan

mereka karena krisis seharusnya ditempatkan di wilayah tersebut,” menurut Marina.

Di Rio Grande do Sul, sebanyak 200 keluarga mengokupasi pertanian São João D’Armada, di munisipal Canguçu. Pertanian ini berada pada areal seluas 1,130 are dan dianggap tidak produktif oleh INCRA (Institut Kolonisasi dan Pembaruan Agraria Nasional) pada 2007, namun tidak pernah digusur. Di São Luiz Gonzaga, sebanyak 300 buruh pedesaan memulai aksi menuju latifundia (pertanian besar) dari sebuah kamp di jalan tol BR 285. Sebuah Perjanjian Penyesuaian (TAC) ditandatangani oleh INCRA untuk menetapkan areal tersebut menjadi areal pemukiman bagi 2000 keluarga buruh pedesaan pada akhir tahun, namun hanya 700 diantaranya yang benar-benar menempati tanah tersebut.

Di Pernambuco, pertanian Cristina yang terletak di Vitória de Santo Antão, daerah metropolis Recife, diokupasi oleh sekitar 100 keluarga. Area seluas 500 hektar ini tidak produktif dan menjadi milik dewan munisipal. Ini merupakan okupasi ketiga yang dilakukan pada Hari Perjuangan Nasional untuk mewujudkan pembaruan agrarian di Negara ini.

Kemarin (14/4), sekitar 100 keluarga mengokupasi pertanian di Pernambuco, 1000 hektar di munisipal of Inajá, di dalam negara bagian. Hari senin (13/4), keluarga tak bertanah mengokupasi Engenho General in São Lourenço da Mata, dimana mereka masih berkemah.

Di Mato Grosso, sebanyak 300 buruh memulai march untuk land reform, pekerjaan dan perlindungan alam. Mereka dating dari Jangada dan akan berjalan sejauh 100 kilometer menuju Trevo do Lagarto di Varzea Grande, dimana mereka tiba pada hari Minggu (19/4). Pada hari Jumat (17/4) di Cuiabá, buruh tak bertanah akan meluncurkan “Pembatasan Kepemilikan Tanah: dalam Pembelaan terhadap Pembaruan Agraria dan Kedaulatan Pangan,” yang didorong oleh Majelis Populer. Di negara bagian ini ada sekitar 4 ribu keluarga di pemukiman, namun di banyak pemukiman-pemukiman ini bisa secara nyata dilihat penelantaran yang dilakukan pemerintah. Sekitar 3000 keluarga masih hidup dalam kondisi buruk beratapkan terpal hitam, tidur di sisi-sisi jalan di negara bagian Mato Grosso.

Di Pará, perjalanan dimulai dari camp pemuda di Eldorado dos Carajás untuk







mengenang peristiwa pembunuhan petani pada bulan April 1996 lalu. Lebih dari 500 pemuda dari seluruh wilayah Negara bagian mendiskusikan peran pemuda dalam masyarakat, mereka juga tergabung kedalam workshop, melakukan pertemuan dengan INCRA dan membuat drama pembunuhan missal para petani tak bertanah. Di Belém, para pekerja di bagian utara dan timur laut Belem terkonsentrasi di Praça da Leitura, dimana sebuah monument yang bernama "Column of Infamy" berada. Monumen tersebut dibangun sebagai sebuah persembahan bagi para korban dari pembunuhan massal yang dilakukan kepada para petani tak bertanah. Lebih dari 400 orang akan menghadiri kegiatan march dan aksi massa untuk melawan kriminalisasi gerakan social.

Di tingkat distrik federal, 300 keluarga anggota MST dan gerakan pekerja pedesaan (MATRA) menduduki lahan pertanian Engenho di Planaltina (DF). Para pekerja mengeluhkan bahwa pemilik lahan telah melanggar undang-undang perlindungan lingkungan atas penggunaan pestisida pada perluasan lahan tanaman kedelai yang terletak di wilayah yang dilindungi oleh UU tersebut. Para pekerja telah menyusun rencana diskusi untuk membicarakan isu yang akan dibicarakan dalam pertemuan dengan perwakilan nasional INCRA, pejabat daerah dan IBAMA (badan perlindungan lingkungan nasional) pada tanggal 16 April nanti.

Rabu lalu, 200 orang memblokir jalan BR-020 yang juga terletak di wilayah Planaltina. DF, para petani tak bertanah mensyaratkan penempatan 1,800 keluarga yang ada di camp, pemberian bantuan teknis kepada 1,200 families yang sudah ditempatkan, investasi pendidikan, rehabilitasi pemukiman, dan restrukturisasi pejabat wilayah INCRA, SR 28.

Di Bahia, 400 keluarga menduduki lahan pertanian di Camamu (Negara bagian selatan), untuk mengutuk sistem pertanian monokultur berskala luas di wilayah tersebut. Tiga tahun lalu, MST mengaplikasikan sebuah survey oleh INCRA, namun hingga saat ini belum ada hasilnya.

Sekitar 2 ribu petani menduduki kantor sekretariat pertanian di Bahia sejak Senin (13/04), Salvador, untuk mendesak pemerintah dalam memenuhi janjinya. Pada tahun 2007 lalu pemerintah berjanji untuk membangun 5000 rumah dan membangun jalan sepanjang 1200 km di wilayah pemukiman. Di Eunápolis, 800 keluarga masih menduduki 4,700 hektar tanah yang secara illegal digunakan oleh Veracel Cellulose untuk ditanami eucalyptus. Hari Jum'at (17/04), perwakilan dari parlemen akan memperingati 25 tahun kelahiran MST.

Di Roraima, 70 keluarga dari MST, Jumat lalu (10/04), menduduki lahan pertanian Autarraia di kota Bonfim, untuk meminta pembuatan proyek pemukiman

dilahan tersebut dan mendesak INCRA dalam pembangunan pemukiman lainnya di wilayah Negara bagian tersebut. Di Roraima, selama tiga tahun, INCRA tidak membangun pemukiman baru ataupun melakukan sesuatu terhadap pemukiman yang sudah ada. Hingga saat ini tidak ada jalan, rumah, energi, bantuan modal, bantuan alat produksi dan tunjangan terpisah lainnya di wilayah yang sudah dibebaskan oleh IBAMA tersebut.

Di Minas Gerais, sekitar 900 keluarga bergabung untuk menduduki Danda, di Belo Horizonte pada Kamis (09/04). Aksi ini dilakukan bersama dengan Forum of Neighborhood Housing, Popular Brigades dan MST. 900 keluarga petani tersebut mengokupasi 10% tanah melebihi 40 hektar yang seharusnya dimiliki oleh Construtora Modelo. Para petani tersebut menyampaikan bahwa tanah terlantar tersebut terletak di kawasan Céu Azul, dan telah berhutang pajak IPTU (Land and Urban Territory Tax) sejumlah R\$18 jutaan.

Di Sao Paulo, sekitar 120 keluarga petani tak bertanah menduduki Fazenda Nossa Senhora Aparecida, di wilayah Agudos (dekat dengan lahan okupasi di Bauru) pada 06 april lalu. Para petani tak bertanah meminta alokasi lahan yang termasuk kedalam objek pembaruan agraria seluas 700 hektar seharusnya diberikan untuk rakyat.#

**Sambungan dari hal.7** Pertemuan pemuda...

menderita obesitas, dimana 20-25 persen diantaranya ialah pemuda dan anak-anak.

Di Timor Leste sendiri dimana 80 persen penduduknya masih menggantungkan hidup pada pertanian minat pemuda untuk bekerja di sektor ini pun sudah semakin menipis. Kalaupun ada tidak ada dukungan dari pemerintah untuk membantu mereka bertahan di pedesaan. Upaya pemerintah untuk membangun pusat tenaga listrik dengan bahan bakar heavy oil justru menimbulkan masalah pencemaran lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat sekitar belum lagi rusaknya perkebunan kopi di daerah yang menjadi lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik ini. Pembangunan pembangkit listrik ini akan menyebabkan lebih dari 5200 keluarga petani kopi, padahal nantinya hanya perusahaan ini hanya akan menyerap 150 orang tenaga kerja.

Lebih lanjut penggunaan 100.000 ha lahan subur bagi perkebunan tebu untuk bahan baku agrofuel dan pengembangan 3000 ha benih hibrida di District Maliana telah memaksa petani bergeser dari praktek pertanian yang ramah lingkungan menjadi mekanisasi pertanian industri, hal ini menyebabkan berkurangnya pekerjaan di pedesaan dan memaksa petani untuk bekerja di kota atau di luar negeri sebagai buruh migran.

Delegasi pemuda dari negara-negara lain yang datang menginap selama dua hari di desa ini. Disini para pemuda saling berbagi mengenai pangan lokal dan melakukan kegiatan penanaman pohon bersama. Kegiatan reboisasi ini sebagai salah satu langkah melibatkan pemuda dalam kegiatan pelestarian lingkungan.

Selama 1 minggu perkemahan pemuda tani anggota jaringan HASATIL menargetkan menanam sebanyak 3000 batang pohon di kawasan seluas 5 hektar. Reboisasi yang telah dilakukan sejak tahun 2004 di daerah ini telah berhasil mengurangi longsor dan juga menyuburkan lahan sehingga masyarakat sudah bisa kembali bertani di areal ini.

Dalam pertemuan pemuda ini juga diadakan workshop untuk menyusun rencana kerja kegiatan pemuda Via Campesina region Asia Timur-Asia Tenggara untuk 1 tahun ke depan. Dari hasil workshop tersebut permasalahan mendasar yang dihadapi pemuda di pedesaan ialah pemuda semakin jauh dari pertanian atau dipaksa untuk meninggalkan pertanian karena pertanian sudah tidak bisa lagi menjadi harapan hidup akibat semakin tergusurnya keluarga-keluarga tani digantikan oleh perkebunan dan perusahaan-perusahaan transnasional.

Urbanisasi dan migrasi pemuda tani untuk mencari pekerjaan menjadi isu bersama yang dihadapi pemuda tani di Indonesia, Thailand, Filipina, Timor Leste, bahkan Jepang dan Korea Selatan. Di Korea Selatan tingginya tekanan hidup masyarakat pedesaan telah mendorong banyaknya orang yang putus asa dan bunuh diri. Dalam 3 tahun terakhir tercatat 3000 orang petani melakukan bunuh diri karena tidak mampu menghadapi tekanan hidup akibat liberalisasi pertanian dan serbuan pangan murah hasil dari perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara lain.

Dari sinilah dirasakan adanya kebutuhan mendesak untuk

dilaksanakannya pendidikan bagi pemuda di pedesaan mengenai pertanian berkelanjutan dan juga mengenai pengolahan makanan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian seperti yang telah dilakukan komunitas petani teh organik di Jepang. Sehingga untuk satu tahun ke depan difokuskan bagaimana mendorong organisasi tani di negara masing-masing untuk meningkatkan pendidikan bagi pemuda di pedesaan serta memperkuat peran pemuda di dalam organisasi. Pertukaran pengetahuan pangan lokal dan praktek pengolahan makanan juga harus dimajukan. Pada saat yang bersamaan komunikasi dan pertukaran informasi antar organisasi harus terus dilakukan, sehingga dapat saling mengetahui kegiatan yang dilakukan dan memberikan inspirasi satu sama lain.

Pada konferensi pers hari terakhir pertemuan Achmad Ya'kub Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional SPI yang merupakan salah satu delegasi pemuda lainnya dari Indonesia menyampaikan kembali pentingnya penegakan hak asasi petani dan pelaksanaan pembaruan agraria dan mendorong pemerintah negara masing-masing untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak asasi petani dan menjamin pendistribusian tanah bagi para petani skala kecil dan petani tak bertanah. Berbagai konflik agraria yang terjadi di berbagai negara juga disebabkan karena hak asasi petani tidak dijamin dan dilindungi. Hal itu jugalah yang menyebabkan pemuda tani terpaksa pindah ke kota atau bermigrasi untuk mencari pekerjaan.#



## PANDANGAN DAN SIKAP SERIKAT PETANI INDONESIA

# Analisis ekonomi politik: krisis ekonomi nasional dan internasional

### Pendahuluan

Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai macam krisis. Krisis energi yang ditandai dengan naiknya harga minyak hingga mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Krisis tersebut diikuti dengan kenaikan harga komoditas pangan dunia. Praktis kedua komoditas penting ini telah menjadi bencana bagi penduduk miskin di berbagai belahan dunia. Tidak cukup sampai di situ, krisis kemudian muncul dari sektor keuangan. Krisis keuangan yang berawal di Amerika Serikat telah berkembang secara global dan ikut menyeret negara-negara miskin terjebak didalamnya.

Situasi yang terjadi pada ekonomi internasional tersebut, dikarenakan mode ekonomi yang dilasanakan selama ini adalah mengandalkan mekanisme pasar yang liberal, dimana setiap sektor perokomian terkoneksi satu sama lainnya. Krisis yang terjadi pada Lehman Brothers adalah sebagai bagian dari krisis keuangan di Amerika Serikat yang berdampak bagi perekonomian secara menyeluruh. Karena sifat dasarnya kapitalisme adalah predator dan terkoneksi secara global, maka krisis yang terjadi di Amerika dengan cepat merembet dan memakan korban ke daratan Eropa, Australia, Asia dan belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia.

Sepanjang tahun 2007 hingga 2008 Indonesia menghadapi situasi kenaikan harga bahan-bahan pangan secara pesat. Pada pertengahan 2007 rakyat Indonesia dipusingkan dengan melonjaknya harga minyak goreng yang kini telah mencapai Rp 15.000 per kg atau naik 43 persen dibandingkan harga periode yang sama tahun sebelumnya. Harga kedelai meningkat hampir 200 persen hingga kisaran Rp. 7.800 sampai 8000 per kg yang merupakan harga tertinggi sejak 24 tahun terakhir. Menyusul kenaikan harga bahan pangan lainnya seperti beras, jagung, gula, susu hingga daging.

Hal ini tentu sangat berat dampaknya terhadap kehidupan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat miskin. Karena persentase pengeluaran terbesar rumah tangga miskin adalah untuk pangan, yaitu sekitar 50 hingga 70 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Hal ini juga diperkuat dengan laporan yang dibuat ECONIT – sebuah lembaga pengkajian ekonomi politik di Jakarta, yang mengatakan bahwa pada kelompok masyarakat miskin 75 persen pengeluaran rumah tangga mereka untuk pangan sementara pada rumah tangga tidak miskin hanya 23 persen pengeluaran rumah tangga yang dialokasikan untuk pangan.

Demikian juga terjadi atas harga minyak di Indonesia. Kenaikan harga BBM menjadi pilihan kebijakan pemerintah. Langkah kenaikan harga BBM (premium, solar dan minyak tanah) di lakukan pemerintah pada Mei 2008, tidak peduli dengan keberatan sebagian besar masyarakat. Betapa pentingnya, maka pemerintah mengumumkan melalui sepasukan menteri terkait seperti menteri keuangan, menteri ESDM, menteri perdagangan, menkokesra, mensos, serta beberapa orang lainnya seperti jubiir presiden, direktur Pertamina dan beberapa ahli dari departemen perekonomian.

Alasan utamanya adalah karena kenaikan harga minyak di Internasional tidak dapat dihindari, oleh karena itu pada level

nasional harus ikut dinaikan dan memang harga BBM di Indonesia dianggap oleh pemerintah masih terlalu rendah. Secara resmi kenaikan BBM rata-rata sebesar 28,7%. SPI telah mencatat bahwa pemerintah yang dipimpin oleh SBY-JK telah tiga kali menaikkan harga jual BBM, dengan kenaikan hampir 200%. Sementara resep bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp. 100.000 adalah bersifat sementara untuk memperlambat penderitaan rakyat.

### Tentang krisis harga BBM

Mengenai kenaikan harga BBM ternyata ada variabel yang tidak dibuka secara jujur oleh pemerintah yakni adanya dokumen utang pemerintah Indonesia kepada Bank Dunia pada program energy and mining development, Loan No. 4712-IND mulai tahun 2003 hingga Desember 2008. Dimana program utang sebesar \$ 141 juta USD, bertujuan untuk menghilangkan subsidi bahan bakar kepada rakyat. Tujuan dasarnya adalah menyerahkan semua urusan BBM kepada pasar.

Sebagaimana dapat disimak dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004 – 2009, pemerintah sejak semula sudah merencanakan untuk menekan volume subsidi dari 6,7 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2004, menjadi hanya 0,3 persen PDB pada 2009. Artinya, penghapusan subsidi BBM memang sudah direncanakan sejak lama.

Dalam rangka itu, sudah sejak jauh-jauh hari pula, melalui penerbitan UU No. 22/2001 tentang minyak dan gas bumi, pemerintah berupaya agar harga BBM secara legal diserahkan ke mekanisme pasar. Artinya kebijakan menaikkan harga BBM bukan sekedar merespon situasi ekonomi global belaka. Namun tidak lepas dari sistem ekonomi neoliberal yang dipraktekan oleh para “mafia barkeley”. Dimana diseluruh sendi kehidupan masyarakat akan di liberalisasi, diprivatisasi dan dideregulasi untuk memenuhi kebutuhan mekanisme pasar untuk kepentingan pemodal. Hal ini juga terjadi pada kebijakan listrik, air dan pertanian. Khusus migas maka tidak aneh bila pada kenaikan BBM Oktober 2005 kemudian diikuti dengan dibukanya tempat pengisian bahan bakar milik perusahaan besar asing, seperti Shell dan Petronas di Indonesia. Padahal jelas dalam mandat UUD 1945 bahwa sebagai cabang produksi dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Sekarang ini, seperti halnya turunnya harga bahan pangan pada level internasional, harga energi/minyak mentah juga turun pada pasar dunia seiring ambuknya sektor finansial dan pelambatan ekonomi dunia tidak mampu menahan penkerutan tajam ekonomi dunia. Meskipun harga minyak mentah dunia yang sempat mencapai US\$ 147 per barel pada tahun 2008, telah turun tajam menjadi berkisar US\$ 30- US\$ 45 per barel. Serta pemerintah telah mengembalikan harga BBM sebelum kenaikan Mei 2008, namun secara nasional harga kebutuhan pokok dan harga lainnya tidak dengan mudah ikut turun

### Krisis harga pangan

Krisis pangan yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Krisis ini berakar dari perjalanan panjang

liberalisasi dan spekulasi pangan dan pertanian. Berkembangnya liberalisasi perdagangan termasuk di sektor pertanian didukung oleh Teori Keunggulan Komparatif yang dikemukakan oleh Adam Smith dan disempurnakan oleh Ricardo. Dasar pemikiran yang dipakai hingga hari ini ialah pandangan Smith yang mengatakan “Jika sebuah negara dapat mensuplay kita dengan komoditi yang lebih murah maka lebih baik kita membeli dari mereka daripada memproduksi sendiri.” Akibat dari pengembangan ini ialah berkembangnya suatu sistem penjajahan baru yang dilakukan oleh negara-negara maju lewat perusahaan-perusahaan besar yang didukung oleh lembaga internasional seperti WTO. Meluasnya dumping produk pangan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap impor pangan.

Di Indonesia sendiri tiga kredo Konsensus Washington, privatisasi, liberalisasi dan deregulasi semakin mendominasi kebijakan di Indonesia—terutama kebijakan terkait pangan dan pertanian. Paket kebijakan ini didorong oleh berbagai lembaga keuangan internasional ini disebut sebagai paket kebijakan neoliberal. Menurut Sritua Arif, kebijakan neoliberal memiliki ciri-ciri yang mengusung semangat kredo Konsensus Washington, seperti meminimalkan atau menghilangkan intervensi pemerintah dalam berbagai sektor kehidupan rakyat, karena dianggap sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi.

Kapitalisme neoliberal yang bersendikan imperialisme Amerika dan negara-negara sekutunya, perusahaan-perusahaan transnasional dan dominasi dalam institusi-institusi keuangan internasional dan regional seperti Bank Dunia, Asian Development Bank, dan International Monetary Fund (IMF) serta World Trade Organisation (WTO) telah melahirkan penjajahan yang mendalam melalui kebijakannya. Sistem ini telah melanggengkan eksploitasi negara-negara maju terhadap negara-negara miskin dan berkembang terutama melalui kegiatan industri pertambangan, perkebunan, kehutanan, air, ketenagakerjaan serta pembayaran utang luar negeri. Berikut dijabarkan mengenai mekanisme kebijakan neoliberalisme yang berkembang pada sektor pangan dan pertanian di Indonesia.

- \* Privatisasi pangan; Dengan privatisasi mendorong pemerintah lepas tangan terhadap berbagai tanggung jawabnya. Didorong oleh penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan IMF, pemerintah memprivatisasikan berbagai sektor yang seharusnya menjadi State Obligation. Industri hulu hingga hilir produksi pertanian Indonesia dikuasai oleh perusahaan-perusahaan pertanian besar. Salah satu contohnya ialah perubahan Badan Urusan Logistik (Bulog) dari Lembaga Pemerintah Non Departemen menjadi Perusahaan Umum, yang posisinya sama dengan perusahaan swasta.
- \* Liberalisasi; mekanisme perdagangan produk pertanian yang ditentukan oleh rezim perdagangan bebas semenjak 1995 lewat Agreement on Agriculture, WTO. Indonesia pun turut melakukan upaya liberalisasi terhadap hal yang harusnya merupakan state obligation terhadap rakyat. Akses pasar Indonesia dibuka lebar-lebar, bahkan bea masuk untuk pangan impor diturunkan hingga 0 persen seperti pada kedelai (1998, 2008), terigu (2008) dan beras (1998). Hal tersebut menyebabkan berbagai pangan pokok seperti beras, jagung, kedelai, gula, susu dan daging sapi menjadi sangat mengandalkan impor. Pada tahun 2004, 9,13 persen kebutuhan nasional akan jagung masih disupply oleh jagung impor, sementara kedelai, gula, susu dan daging sapi masing-masing 60,98 persen, 19,70 persen, 92 persen dan 4,08 persennya tergantung pada pintu impor. Tercatat Indonesia masih mengimpor gandum 3,5-5 juta ton, jagung 1,2 juta ton, beras 2 juta ton, kedelai 1,2 juta ton, gula pasir 1,7 juta ton untuk tiap tahunnya. Sementara untuk pemenuhan kebutuhan susu dalam negeri, hampir 90 persen dipenuhi dari impor. Setiap tahunnya rata-rata Indonesia mengalami defisit dari perdagangan pangan sebesar 1,89 milyar US\$ atau lebih kurang Rp 17 trilyun.

- \* Deregulasi; beberapa kebijakan sangat mempermudah perusahaan besar untuk berkembang yang mengalahkan pertanian rakyat. Seperti contoh UU No. 72004 tentang Sumber Daya Air yang merupakan bagian dari program Bank Dunia yang mempromosikan jual-beli air dengan program bernama Water Structural Adjustment Loan (WATSAL), Perpres 36 dan 65/2006 tentang Penggunaan Tanah bagi Kepentingan Publik, UU No. 18/2003 Tentang Perkebunan, dan yang terbaru ialah UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dengan kemudahan ini, upaya privatisasi menuju monopoli atau kartel di sektor pangan semakin terbuka.

Di tingkat nasional, apabila kita analisis kebijakan ekonomi politik pertanian di Indonesia sepanjang pemerintah SBY – JK sampai hari ini masih terus menjalankan prinsip-prinsip neoliberalisme, yaitu menjalan ketiga prinsip tersebut. Hal itu bisa di lihat pada Program Revitalisasi Pertanian Perikanan dan Kelautan (RPPK) yang di canangkan pemerintah pada prinsipnya adalah merupakan generasi terbaru Green Revolution yang di jalankan pada masa orde baru. Kemudian Perogram Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang di janjikan pemerintah tidak dijalankan sama sekali, sebaliknya lebih mengalokasikan tanah-tanah subur di tanah air untuk kepentingan modal besar melalui proyek-proyek perluasan agrofuel atau atas nama konservasi.

Di tingkat Internasional ketiga prinsip itulah kemudian berlansungnya spekulasi perdagangan hasil produksi pertanian. Sebut saja sebagai indikator misalnya pada tahun 2007 sektor finansial (pasar modal dan pasar perbankan) sudah 12 kali lebih besar dibandingkan dengan sektor riil (proxy GDP). Inilah yang kemudian disebut ekonomi balon (buble economic) pada tahun 2008 lalu.

Mengenai harga internasional yang meningkat tajam beberapa waktu lalu, menunjukan peran spekulasi yang tinggi selain pertumbuhan ekonomi dunia yang memerlukan banyak energi. Seperti negara di Asia, China, India dan beberapa negara amerika utara seperti Brasil dan tentu Amerika Serikat dan Eropah.

Titik balik krisis keuangan yang dipicu kredit perumahan berkualitas rendah (sub-prime mortgage) di AS kini menimpa sektor pertanian dan energi. Jika semula krisis keuangan beriringan dengan krisis energi dan krisis pangan yang ditandai meroketnya harga energi dan pangan, kini setelah berlalu hampir setahun harga energi dan pangan, terutama komoditas perkebunan, berguguran.

Ada kenyataan yang sangat berbeda antara krisis ekonomi sepuluh tahun lalu dengan krisis kapitalisme sekarang ini. Sepuluh tahun permintaan dunia dan harga komoditi masih relatif tinggi, sehingga pokok masalahnya adalah anjloknya nilai tukar rupiah. Kondisi seperti itu menguntungkan beberapa perusahaan eksportir dan sedikit petani komoditas diluar pulau jawa. Mereka justru mendapatkan Windfall (untung mendadak) karena pendapatan mereka dalam rupiah meningkat. Tetapi saat ini berbeda, permintaan dunia dan harga komoditi justru turun merosot tajam karena adanya resesi keuangan. Akibatnya walau rupiah telah merosot dari Rp. 9.000 menjadi Rp. 12.000 per dollar AS tetapi tidak banyak membantu penurunan pendapatan pengeksportir dan petani komoditas

### Tentang krisis kapitalisme

Pemutusan hubungan kerja semakin menyebar ke seluruh dunia disebabkan oleh deindustrialisasi dan turunnya daya serap produksi. Jumlah ekspor yang menurun tidak hanya karena turunnya permintaan tetapi juga aksi setiap negara untuk mengetatkan impor untuk menyelamatkan ekonomi negaranya masing-masing. Aliran pelarian modal semakin besar karena investor asing ingin menyelamatkan kebutuhan likuiditas di negara asalnya. Depresiasi mata uang, krisis nilai tukar, dan

tekanan inflasi memperbesar efek krisis yang dirasakan negara-negara berkembang.

Jika pada tahun 80-an dan 90-an krisis terjadi terutama di negara-negara Selatan, krisis tahun 2008 justru berpusat di Amerika Serikat dan segera menjalar Eropa. Namun dengan format ekonomi-politik saat ini, negara dunia ketiga justru telah menanggung biaya krisis (cost of crisis) yang sangat berat. Pemulihan krisis di negara pusat kapitalisme, kini menjadi beban yang tidak terhindarkan bagi negara-negara miskin.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada bulan oktober 2008 mengeluarkan rilis bahwa jumlah pengangguran akan meningkat setidaknya hingga akhir tahun 2009 akan mencapai 210 juta orang. Artinya dalam dua tahun sejak 2007 akan tercipta pengangguran baru sebanyak 20 juta orang, menyusul yang 190 juta yang sebelumnya sudah menganggur. Kalau mau detail lagi akan ada 834.000 pengangguran baru per bulan atau 27.397 orang per hari.

Krisis ini begitu dasyatnya sehingga perusahaan besar seperti Lehman Brothers yang berdiri sejak tahun 1800-an saja keok alias bangkrut, demikian juga General Motor sebagai raksasa otomotif dari AS yang berniat bangkrut berbasib baik diselamatkan oleh pemerintah AS. Sementara itu pabrikan otomotif asal AS lainnya Chrysler sudah memecat tenaga kerjanya sebanyak 5.000 orang dan Citigroup mem-PHK sebanyak 50.000 pegawainya. Adapun perusahaan securitas Merrill Lynch setelah diakuisisi Bank of America Corp senilai US\$50 miliar terancam juga memecat 10.000 pegawainya.

Bagaimana di Indonesia? Menurut tim monitoring dampak krisis Depnakertrans per 28 Nopember 2008 ini saja sudah ada 16.988 orang yang di PHK dan 23.927 orang yang akan di PHK. Sementara itu terdapat 6.597 orang yang sudah dirumahkan dan 19.091 orang yang akan dirumahkan. Kemudian membengkak per maret 2009 menjadi 37.909 orang yang terkena PHK. Data tersebut menurut versi resmi pemerintah, namun data Apindo daerah menyatakan, sampai Maret sudah ada 240.000 orang yang kena PHK. Repotnya, itu terjadi pada sektor-sektor usaha yang penting dan bersifat padat karya, seperti tekstil dan garmen sebanyak 100.000 orang, sepatu (14.000), mobil dan komponen (40.000), konstruksi (30.000), kelapa sawit (50.000), serta pulp and paper (3.500). belum lagi sudah dipastikan akan ada 100 ribu buruh migran Indonesia akan dipulangkan dari Malaysia akibat bangkrutnya industri manufaktur disana. Sebagian besar buruh migran tersebut berasal dari pedesaan Jawa, Nusa Tenggara dan Sumatra.

Akibat pastinya atas situasi krisis ini adalah daya beli masyarakat akan semakin rendah, dengan daya beli masyarakat rendah artinya perputaran ekonomi akan melambat terutama disektor riil. Dengan demikian rentetan berikutnya adalah makin mendalamnya kesusahan rakyat miskin.

Bila tidak ada tindakan yang nyata dan dikelola dengan bijak oleh negara maka tidak mustahil ke depan berbagai kerusuhan sosial dan politik akan terjadi terkait perebutan sumber-sumber alam seperti air, pertambangan dan pangan/pertanian. Hal ini senada dengan isi laporan Dewan Intelijen Nasional (NIC): ke depan, potensi konflik akan terjadi akibat perebutan sumber kekayaan alam dan buah dari terbentuknya kekuatan multipolar, yakni AS, India, Rusia, China, Eropa, dan Indonesia juga disebut-sebut ada di dalamnya.

Apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Amerika di bawah pimpinan Barack Obama, adalah memberikan paket stimulus fiskal sebesar US\$900 miliar. Hal ini kemudian menjadi tren kebijakan di hampir seluruh dunia saat ini. Yang tentu kemudian membuat komitmen negara-negara yang tergabung dalam G-20 adalah membuat paket stimulus ekonomi sebagai agenda dan kebijakan penanggulangan krisis secara global. Prinsip dasarnya adalah bagaimana melakukan reformasi struktural perekonomian dunia yang berlandaskan pasar. Dengan mendorong investasi dan perdagangan bebas, serta meningkatkan peran lembaga keuangan internasional (IMF, WB,

ADB dll) guna meningkatkan utang bagi negara yang terkena krisis.

Hal ini makin nyata dengan adanya berbagai komitmen utang baru dari ADB, IDB dan Bank Dunia serta pemerintah Jepang dan Australia, dalam berbagai mekanisme dan program.

Di Indonesia DPR telah menyetujui pemberian stimulus fiskal sebesar Rp 73,3 triliun.

Kita simak peruntukannya yakni terdiri dari stimulus perpajakan Rp 56,3 triliun melalui penurunan tarif PPh, PPN dan BM DTP, PPh pasal 21, PPh pasal 25, serta fasilitas pajak lainnya. Untuk stimulus belanja Rp 17 triliun terdiri dari infrastruktur Rp 12,2 triliun dan Rp 4,8 triliun untuk subsidi langsung dan energi.

Artinya sebagian besar stimulus fiskal (80%-an) adalah tax saving, bukan program belanja langsung pemerintah yang mendorong bergeraknya ekonomi dalam negeri. Tetapi lebih kepada pengurangan potensi penerimaan pemerintah. Porsi tax saving maupun subsidi pajak dan bea masuk yang sangat besar menunjukkan keberpihakan pemerintah yang lebih besar kepada kelompok masyarakat kaya daripada rakyat miskin. seharusnya anggaran tersebut didorong untuk digunakan bagi pelaksanaan reforma agraria, serta meningkatkan belanja langsung pemerintah. Bukan sebaliknya justru untuk mempertebal kekayaan pengusaha dan pemotongan tarif barang impor dari luar negeri ketimbang menyerap hasil produksi dalam negeri.

Nyatalah bahwa inti dari paket stimulus fiskal yang dimotori dari Amerika sana hanyalah salah satu strategi menyelamatkan diri dari neoliberalisme dengan memakan korban negara-negara miskin. Fenomena Barack Obama membawa perubahan hanya menguntungkan sebagian kecil perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara kaya saja.

### **Membangun ekonomi nasional sesuai mandat konstitusi**

Praktek neoliberal tidak hanya terbukti telah gagal, tetapi juga telah memperlebar jurang kemiskinan karena kemakmuran hanya terpusat pada segelintir orang. Dalam konteks Indonesia, Saatnya beralih pada gagasan alternatif bagi sistem politik-ekonomi global yang konsisten pada nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan, nasionalisme, gotong-royong, dan keadilan sosial.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945: "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi."

Keinginan untuk meraih kemandirian dan kedaulatan ekonomi seharusnya diartikan sebagai impian untuk melepaskan ekonomi Indonesia dari jeratan dan ketergantungan asing, baik oleh negara asing maupun korporasi transnasional. Sebagaimana kita tahu untuk menuju kemandirian ekonomi tersebut, Indonesia harus mampu mewujudkan kedaulatan di bidang keuangan, pangan, maupun energi.

Krisis finansial global saat ini adalah suatu bukti bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang membiarkan pasar mengatur dirinya sendiri hanya dipakai oleh kelompok pemodal untuk terus memperkaya dirinya sendiri melalui kegiatan-kegiatan spekulasi. Sebagai contoh konkrit dalam pertanian adalah meletakkan perusahaan agribisnis terlebih agribisnis transnasional menjadi pemain utama di sektor pertanian serta perkebunan merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Terlebih meletakkan sektor riil produk pertanian menjadi ajang spekulasi di bursa saham

(stock exchange) membuat petani tidak mempunyai jaminan dan kepastian harga yang memadai. Untuk itu harus segera digelorkan jalan konstitusi untuk menyelamatkan bangsa dari krisis kapitalisme yang terjadi dengan cara dibawah ini;

Pertama, Untuk mengatasi krisis harga pangan maka jalan rakyat berupa kedaulatan pangan menjadi pilihan utama. Kedaulatan pangan membawa sebuah pesan yang sangat jelas bahwa yang hendak dicapai oleh konsep ini ialah ekonomi rakyat/kaum tani yang berdaulat agar kaum tani dapat hidup bermartabat. Mengutamakan produksi lokal yang berdasarkan pada ekonomi rakyat dan orientasi lokal atau nasional sangat penting sebagai landasan pembangunan dibandingkan dengan orientasi internasional. kedaulatan pangan akan tercapai bila syarat dasarnya terpenuhi, yaitu;

1. Adanya pelaksanaan reforma agraria sebagai landasan utamanya
2. Adanya hak akses rakyat terhadap pangan
3. Penggunaan sumber alam secara berkelanjutan
4. Pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan
5. Pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi
6. Melarang penggunaan pangan sebagai senjata
7. Pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.
8. Pembangunan Industri berbasis pedesaan dan pertanian

Strategi untuk menciptakan stabilitas dan keadilan harga bagi produk pertanian dan perkebunan di Indonesia harus didasari dengan pembaruan agraria mengingat timpangnya penguasaan sumber-sumber agraria dari hulu hingga hilir yang cenderung dikuasai oleh perusahaan-perusahaan agribisnis dan perkebunan swasta baik nasional maupun multinasional. Hal ini juga merupakan langkah memujudkan kedaulatan pangan.

Hentikan perluasan perkebunan non pangan oleh perusahaan dan orientasi ekspor, sebaliknya pemerintah harus mendorong pertanian pangan berbasis keluarga dan orientasi pemenuhan kebutuhan lokal dan nasional. Dengan demikian memberikan insentif bagi petani pangan, terutama yang melaksanakan pertanian berkelanjutan; dan dengan itu menghentikan subsidi bagi usaha pertanian yang tidak berkelanjutan (pertanian korporasi dan monokultur). Kemudian segera bangun lumbung-lumbung pangan .

Kedua, terkait krisis energi beberapa langkah konkrit yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah, kebijakan penghematan energi dengan pajak tinggi bagi kalangan yang menggunakan energi yang besar. Mendorong kembali rakyat pedesaan yang kembali menjadi penghasil energi, yang akibat dari sistem neoliberalis menjadi konsumen energi. Pergunakan secara maksimal teknologi energi yang merakyat, murah dan massal seperti tenaga air, angin, matahari, gelombang laut dan biogas. Memastikan terpenuhinya kebutuhan nasional sebelum adanya ekspor minyak. Kemudian pemerintah harus segera mereview atas Kontrak Karya Pertambangan terutama perusahaan migas asing yang selama ini tidak menguntungkan kepetingan dalam negeri.

Ketiga, Kegiatan ekonomi yang dilakukan ke depan seharusnya adalah rencana dari terwujudnya keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Dan jalan menuju keadilan ekonomi tersebut adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi yang tercantum dalam konstitusi. Konsepsi ini sudah jauh hari diperkenalkan sebagai dasar berdirinya demokrasi ekonomi sebagaimana terangkum dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945: "dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi". Penguasaan aset-aset strategis oleh negara lewat BUMN sangat penting bagi Indonesia. Karena ketika krisis kembali terjadi yang bisa diandalkan pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi nasional hanyalah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut. Langkah tersebut sesuai dengan amanat konstitusi mengenai pasal-pasal ekonomi yakni bumi dan air dan kekayaan harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam momentum krisis kapitalisme saat ini, wacana dan praktek tersebut wajib disuarakan luas. Kerja sama yang lebih luas juga diperlukan dalam konteks pemikiran ekonomi-politik alternatif, terutama yang sesuai dengan kondisi bangsa ini. Keseluruhannya adalah dalam rangka koreksi total sistem ekonomi-politik pasca krisis kapitalisme global, menuju dunia yang lebih berkeadilan.

Disamping itu sejumlah strategi jangka pendek perlu untuk terus dibangun. Petani Indonesia tidak bisa terus menerus menjadi buruh penghasil bahan mentah bagi keuntungan para pemilik modal. Petani perlu mengambil kembali posisinya yang sangat penting dengan mengubah ekonomi berbasis modal dan persaingan (capital driven economy) menjadi ekonomi berbasis solidaritas masyarakat (people driven economy). Menghidupkan koperasi-koperasi tani untuk meningkatkan posisi tawar petani, serta membangun industri pengolahan pasca produksi yang dimiliki petani yang juga memiliki peranan penting dalam proses pembangunan pedesaan.

**13 Maret 2009**  
**Depok, Jawa Barat**

*Ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat (DPP)  
Serikat Petani Indonesia (SPI)*



**Widian**  
**ORGANICS**

**Sayuran organik, bebas pestisida**

**Sehat, Alami.**

## PANDANGAN DAN SIKAP SERIKAT PETANI INDONESIA

# Pandangan politik petani 2009: jalan rakyat sebagai pedoman

### Pendahuluan

Politik Indonesia yang terkontrol dan tersentralisasi ala Soeharto pada zaman orde baru melalui alat negara dan alat pemerintahannya sudah kita lewati. Secara konseptual seharusnya proses perubahan demokrasi politik yang terjadi menuju pada perbaikan kesejahteraan dan kedaulatan politik rakyat. Sandaran ideologis kebijakan itu sangat jelas yakni Pancasila dan UUD 1945 yaitu mewujudkan sistem politik yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun harapan dan proses yang kita jalani sekarang ini sebagai era reformasi, melalui ide-ide transisi dan konsolidasi demokrasi justru diisi dengan pelembagaan demokrasi prosedural yang elitis. Sumbatan-sumbatan demokrasi memang sudah terbuka, tetapi tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Kondisi demokrasi yang terjadi isinya adalah pembukaan, pengamanan dan kelanjutan bagi akumulasi, ekspansi dan eksploitasi seluas-seluasnya oleh elite politik nasional dan kekuatan Transnasional Nasional korporasi.

### Sistem Politik Saat Ini

Ada beberapa catatan yang terjadi dalam sistem politik Indonesia, sejak era reformasi sampai sekarang ini yakni;

Pertama, Desentralisasi melalui otonomi daerah tidak melahirkan distribusi kekuasaan ekonomi politik sebagai bagian dari ide kebhineka-an. Sebab yang muncul adalah pemindahan dari pusat kepada elite-elite daerah. Sementara, ide dan praktek kesejahteraan rakyat menjadi asing. Bahkan hingga sekarang alokasi anggaran dari nasional ke daerah masih menjadi sumber utama dan tidak berkolerasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Lebih jauh, kuasa pemerintahan nasional menjadi mandul. Antara Presiden dengan gubernur, gubernur dengan Bupati/walikota dan sebaliknya tidak mempunyai rantai “komando” pemerintahan yang kuat. Yang muncul adalah nasionalisme palsu untuk mengeruk kekayaan alam di daerah untuk kepetingan elite daerah sendiri atau kolaborasi antara kekuatan modal nasional/internasional dengan elit – elit politik daerah dan nasional.

Kedua, Ketidak konsistenan didalam struktur konstitusi dan perundangan. Pendekatannya adalah kompromi modal dan pembagian kekuasaan. UUD 1945 di amandemen, dimana ide negara “gotong royong” menuju kesejahteraan rakyat yang termaktub dalam pasal 24 dan 33, UUD 1945 dikangkangi dengan model ekonomi pasar serta tidak dijalkannya UUPA 1960. Sebagai contoh nyata adalah beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan dari kurun waktu 1998-2007 melalui serangkaian peraturan perundangan yang berkaitan dengan sumber-sumber agraria, perburuhan, privatisasi, pencabutan subsidi, energi, bahan bakar nabati, impor benih, impor beras dan penanaman modal. UU maupun regulasi tersebut adalah UU Kehutanan (1999), UU Migas (2001), UU Perkebunan (2004) yang menggusur petani, UU Sumber Daya Air (2004) yang membuka peluang privatisasi air, Perpres No. 36 (2005), Perpres No. 65 (2006) hingga yang terbaru adalah UU Penanaman Modal (2007) yang isinya total mengejawantahkan prinsip-prinsip neokolonialisme-imperialisme.

Ketiga, Terjadinya Pemisahan dan pembagian kekuasaan yang mengarah pada fragmentasi kekuasaan ke dalam institusi-institusi politik baru yang bersifat ad-hoc. Dimana peran dan fungsi lembaga-lembaga negara yang permanen tergeser. Sehingga pada gilirannya mengakibatkan ketidakharmonisan antar lembaga, hal ini dapat mencerminkan bahwa sistem politik dan desain ketatanegaraan kita tidak kuat.

### Pemilu dan perubahan sejati melalui jalan rakyat

Pada tahun 2009, demokrasi politik euforia yang liberal mencapai puncaknya. semua elemen bangsa memandang bahwa perubahan akan tercapai melalui pemilu dan partai politik adalah satu-satunya bentuk organisasi yang mampu merubah bangsa. Hipnotis politik pasar secara bebas dengan mengandalkan kekuatan modal begitu mendalam.

Partai politik dan pemilu telah mengambil ruang publik dua tahun terakhir ini. Hal ini mengarah kepada aktivitas politik yang tinggi, dimana sistem multi partai telah melibatkan berbagai kalangan dalam ajang perebutan kekuasaan serta bagaimana “mengamankan” posisi kekuasaannya semata. Pemilihan legsilatif secara langsung dengan suara terbanyak menyebabkan polarisasi politik ditingkat rakyat semakin terpecah. Inisiatif pilihan politik rakyat kali ini tidak mencerminkan atas pilihan ideologi politik atau program tertentu, namun lebih mengarah kepada primordialisme dalam arti lebih luas seperti karena keluarga, tetangga, persaudaraan, suku, agama dan politik uang. Bahkan aktor politik juga semakin terpolarisasi didalam partainya sendiri. Agenda partai tidak berjalan, kemudian yang muncul adalah individu politik atas partai politik. Juga munculnya individu “badut” politik baru dengan wajah dan cara baru namun isinya sama

Atas keadaan itu, rakyat telah belajar banyak, melalui pengalaman praktek politik sejak reformasi 10 tahun lalu sampai sekarang ini. Pesta demokrasi prosedural ini hanya menguntungkan elite yang mempunyai akses ekonomi dan politik saja dan bukan sebagai hajat rakyat. Individu-individu yang terlibat akan hanyut dalam budaya dan birokrasi politik elite. Kalaupun ada perlawanan sifatnya hanya kasus, minoritas. Keadilan itu tak pernah terjadi, kejadian hari-hari rakyat sama saja siapapun pemimpinnya. Petani tidak berkecukupan tanah, konflik agraria terus terjadi, buruh menghadapi ketidak pastian dalam pekerjaan dan ancaman pemutusan hubungan kerja, pelajar dan mahasiswa terus menghadapi biaya sekolah yang tinggi dengan privatisasi dunia pendidikan, nelayan semakin berkurang hasil tangkapannya, karena wilayah tangkapan mereka yang sudah dikuasai dan terus dieksploitasi oleh kapal-kapal milik pengusaha besar. Sehingga mengakibatkan terjadinya sikap apatis yang diikuti dengan kemuakan rakyat terhadap sistem politik dan ekonomi yang ada. Di beberapa pemilihan kepala daerah dan Pemilu sebelumnya, dimana angka rakyat yang tidak menggunakan hak konstitusinya masih cukup besar.

Kita tak bisa diam begitu saja membiarkan proses politik berjalan tanpa keterlibatan gerakan rakyat. Oleh karena itu dibutuhkan suatu jalan rakyat untuk segera bangkit melawan. Dengan memperteguh bahwa perubahan yang sejati, adanya di jalan rakyat melalui ; pertama, harus dibangunnya sebuah organisasi kesatuan rakyat secara nasional, yang dicirikan

dengan struktur yang jelas, adanya arah dan panduan kerja konkrit serta dinamis dalam bergerak, dipimpin, cita-cita yang disertai program dan capaian-capaian yang terukur jelas, adanya penghargaan dan sanksi tegas, serta membangkitkan kembali ikatan kelas, budaya dan sosial kaum tani dengan berbagai aktivitas kebudayaan. Membangun mekanisme dari bawah, atas kebutuhan kaum tani, yang radikal, militan dan massif. Kedua, diperlukan suatu kerja-kerja penggalangan sekutu dan persatuan gerakan rakyat yang kuat baik di nasional maupun Internasional.

Sebagai organisasi massa perjuangan kaum tani, Serikat Petani Indonesia (SPI) harus melakukan kerja-kerja politik yang sesuai dengan agenda-agenda perjuangan dan tujuan organisasi yaitu ;

1. Kami petani Indonesia, menolak sistem politik dan pemilu Indonesia yang meminggirkan kedaulatan rakyat di negeri kami sendiri. Sistem politik Indonesia yang berwujud dalam praktek demokrasi liberal hanya menguntungkan segelintir pihak yang berkuasa dan pemilik modal
2. Kami petani Indonesia menyatakan, bahwa pemilu dan partai politik dalam sistem politik sekarang, tidak mencerminkan kedaulatan rakyat dimana para calon legislatif maupun elite politik yang ada semakin terpolarisasi, yang muncul adalah individu politik atas parpol yang saling menjadi predator. Sehingga tidak mencerminkan kerja kolektif partai untuk kemajuan bangsa.
3. Kami petani Indonesia, menyatakan pada pemilu 2009 akan menggunakan hak konstitusi kami, yaitu Memilih untuk Tidak Memilih calon legislatif dan elit politik yang melakukan praktek politik uang serta tidak berpihak pada petani dan menegakkan kedaulatan politik rakyat. Hal ini kami lakukan sebagai perjuangan untuk mewujudkan sistem politik yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mampu memajukan kesejahteraan umum, sanggup mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sanggup untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia.

4. Kami petani Indonesia, menolak cara pandang ekonomi-politik Indonesia yang berkarakter kolonial, ekonomi-politik yang semakin menihilkan kedaulatan rakyat di negeri kami sendiri, dengan karakteristik (i) Memposisikan perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi industri negara-negara maju; (ii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai pasar produk industri negara-negara maju—bahkan produk dumping; dan (iii) Dijadikannya perekonomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang terdapat di negara-negara industrial.
5. Kami petani Indonesia, akan terus berada di bagian terdepan perjuangan rakyat melawan penjajahan baru atau neokolonialisme-imperialisme. Neokolonialisme-imperialisme ini berwujud dalam kebijakan dan praktek sehari-hari globalisasi-neoliberal yang terus menihilkan kedaulatan rakyat di negeri kami sendiri.
6. Kami petani Indonesia, akan bersatu dengan gerakan rakyat yang lain untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan terus mengorganisasikan massa aksi untuk melakukan aksi-aksi massa; baik dalam format gerakan sosial maupun gerakan politik.

Demikian pandangan sikap ini kami nyatakan dengan tegas dan sebenar-benarnya, sehingga seluruh jajaran Dewan Pengurus Serikat Petani Indonesia (SPI) mulai dari tingkat pusat sampai basis serta kaum tani dan rakyat Indonesia dapat memahami dan melaksanakannya.

**13 Maret 2009**  
**Depok, Jawa Barat**

*Ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat (DPP)  
Serikat Petani Indonesia (SPI)*



**Sayuran segar & menyehatkan**

Pelayanan & pemesanan hubungi: 0813380166290  
Lokasi kebun: Desa Cibeureum Darmaga, Kab. Bogor